



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRHAM WAROIHAN
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 876297

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.769.740.000

1. Tanah Seluas 2.829 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
HASIL SENDIRI Rp. 169.740.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/750 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX 4 X 4 MANUAL Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ M/T RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.579.740.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.579.740.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.